

Menguatkan identitas Pancasila dalam demokrasi oleh gen Z

Ririn Renata¹, Risma Kayla Nadine Fardayani²

Program studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 240301110008@student.uin-malang.ac.id¹

Kata Kunci:

Demokrasi, Generasi Z,
Teknologi, Pancasila

Keywords:

Democracy, digital, Gen Z,
participation, technologi

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia terus menghadapi tantangan di era modern, terutama di tengah dinamika demokrasi dan globalisasi yang memengaruhi generasi muda yang termasuk Gen Z. Peran Gen Z dalam demokrasi menjadi semakin penting di era digital yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Mereka dapat meningkatkan keadilan dan integritas dalam proses pemilihan dengan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Di Indonesia, partisipasi kaum muda ini sangat penting untuk mendukung partisipasi demokratis dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan moral negara. Gen Z memiliki peran penting dalam memperkokoh demokrasi di Indonesia, terutama melalui keterlibatan mereka yang aktif dalam pemilu, kampanye sosial, dan gerakan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gen Z memiliki keunikan dalam menginternalisasi nilai Pancasila. Mereka cenderung memanfaatkan teknologi untuk mengekspresikan pandangan mereka terkait keadilan, persatuan, dan keberagaman yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana gen Z dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam partisipasi aktif mereka pada proses demokrasi serta mengeksplorasi bagaimana mereka dapat memperkuat etika dan sistem demokrasi di Indonesia.

ABSTRACT

Pancasila as the foundation of the Indonesian continues to face challenges in the modern era, especially amidst the dynamics of democracy and globalization that influence the younger generation, including Gen Z. Role of Gen Z in democracy is becoming increasingly important in the digital era influenced by technological advances. They can improve fairness and integrity in the election process by actively participating in election supervision. In Indonesia, the participation of young people is very important to support democratic participation and strengthen the values of Pancasila as the state ideology and morals. The results of the syudy show that Gen Z has uniqueness in internalizing Pancasila values. They tend to use technology to express their views on justice, unity, and diversity that are in line with Pancasila values. Gen Z has an important role in strengthening democracy in Indonesia, especially through their active involvement in elections, social campaigns, and political movements. This paper aims to examine how Gen Z can apply the values of Pancasila in everyday life and in their active participation in the democratic process and explore how they can strengthen the ethics and democratic system in Indonesia.

Pendahuluan

Gen Z yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam dinamika politik dan demokrasi. Kelompok gen Z yang lahir dari pertengahan 1990-an hingga awal 2010 tumbuh ditengah kemajuan teknologi dan digitalisasi. Mereka sangat mahir dalam menggunakan teknologi dan media sosial sebagai cara untuk berkomunikasi dan menggerakkan perubahan. Gen Z semakin menonjol dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di Indonesia, terutama dalam hal partisipasi aktif dalam pemilu, kampanye sosial, dan Gerakan politik. Namun penting bagi demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila untuk



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memastikan bahwa gen z terlibat dalam politik tidak hanya melakukan hal-hal teknis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap tindakan mereka

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat dan itu diwujudkan melalui upaya pemerintahan. Dalam sistem ini, setiap warga negara diberikan hak yang sama yaitu hak untuk bebas mengambil keputusan yang akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Adapun yang dimaksud dengan upaya pemerintahan adalah bahwa demokrasi menekankan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak seperti dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan undang-undang. Partisipasi dalam demokrasi ini sangat penting terlebih di negara hukum ini, karena hal itu menjadi sesuatu yang penting dalam mengukur keterlibatan Gen Z dalam kehidupan bernegara. Sehingga Gen Z yang beranggapan bahwa mereka sebagai bagian dari rangka kehidupan bernegara, mereka akan termotivasi untuk terlibat dalam membantu mendorong kemajuan kehidupan negara ini melalui cara-cara terbaik mereka. Ini karena dasar demokrasi adalah sistem pemerintahan Dimana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui upaya Bersama-sama.

Sebagai ideologi negara, Pancasila mengarahkan terhadap kehidupan nasional dan internasional dengan menunjukkan prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari lima sila. Partisipasi secara aktif oleh Gen Z ini seharusnya dipandu oleh prinsip-prinsip moral seperti kebebasan yang tanggung jawab, keadilan sosial dan gotong royong. Pengaplikasian prinsip-prinsip ini ke dalam aktivitas politik seperti kampanye sosial, gerakan politik dan pemilu akan membantu memperkuat moral demokrasi Indonesia dan ikut membantu mendorong kehidupan politik yang lebih beretikaUntuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya literasi yang kuat dan Pendidikan mengenai prinsip prinsip Pancasila yang konsisten. Karena terbukti pada saat ini Gen Z memiliki lebih banyak kemampuan untuk menyebarkan prinsip-prinsip Pancasila kepada orang lain baik secara langsung atau melalui media aktif seperti kampanye digital yang inovatif

Pendidikan dalam politik menjadi suatu hal yang penting bagi generasi muda, karena mereka adalah penerus bangsa. Untuk menjadi melek politik para pemuda membutuhkan pengetahuan politik dan demokrasi yang kuat sehingga mereka dapat berpartisipasi terhadap hal ini dengan rasional. Generasi Z memiliki potensi besar untuk mengubah demokrasi Indonesia dengan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kampanye sosial di media digital, gerakan politik berbasis komunitas dan terlibat dalam proses pemilu. Untuk mencapai hal ini, Generasi Z harus memahami secara mendalam tentang Pancasila dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat dihayati dan ditetapkan dalam setiap aspek partisipasi politik mereka. Oleh karena itu, pendahuluan ini sangat menekankan bahwa penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk membahas bagaimana Generasi ini dapat menintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam demokrasi Indonesia.

Metologi Penelitian

Dalam penulisan mengenai partisipasi aktif Generasi Z terhadap demokrasi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan studi literatur.

Maksudnya adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber Pustaka yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen resmi. Adapun sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk menggali informasi-informasi mendalam terkait topik yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi Identifikasi sumber, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan kesimpulan. Tahapan pertama adalah menentukan focus utama seperti bagaimana media sosial memengaruhi pola pikir remaja, kemudian mengakses jurnal ilmiah, artikel, dan buku mulai dari Google Scholar atau perpustakaan digital lainnya dan sumber yang diambil adalah data yang relevan sesuai dengan penelitian. Mengkaji dan membandingkan beberapa sumber untuk memperoleh kesimpulan yang mendalam, kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan beberapa data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang luas tanpa melakukan pengumpulan data di lapangan.

Pembahasan

Generasi yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012 itu dinamai Generasi Z. Mereka tumbuh di era digital sedang berkembang pesat, kehidupan sehari-harinya sejak mereka kecil sudah diisi dengan internet dan teknologi. Generasi ini dianggap sebagai generasi yang mahir teknologi dibanding dengan generasi sebelumnya. Generasi ini juga dikenal sebagai generasi yang terbuka dan beragam, serta cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Generasi Z, yang tumbuh di Tengah era teknologi, memiliki potensi besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Gen Z menjadi kelompok yang vokal karena kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan teknologi dan media sosial. Mereka juga memiliki pengaruh besar terhadap berbagai masalah sosial dan politik. Namun, karena demokrasi Indonesia berbasis Pancasila, penting bagi Gen Z untuk tidak hanya terlibat secara teknis, tetapi juga memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap bentuk partisipasi politik mereka, seperti dalam pemilu, kampanye sosial, dan gerakan politik. Pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana Gen Z dapat memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai bentuk partisipasi politik.

Demokrasi adalah suatu istilah berasal dari Yunani Kuno yaitu Demos dan kratos yang berarti kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi sangat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi di sebuah negara itu berada ditangan rakyat, yang diwujudkan dengan partisipasi mereka dalam hal-hal politik seperti pemilu dan kebebasan berpendapat. Inti dari demokrasi sendiri adalah pengakuan bahwa rakyat yang berkembang ialah mereka yang membina lingkungan. Dimana kebebasan berekspresi tidak hanya diterimam dengan baik tetapi juga dirayakan. Salah satu pilar utama demokrasi adalah pemilihan, Dimana warga memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Dengan status mereka sebagai pemilih muda. Generasi Z memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan bangsa. Namun, Generasi Z menghadapi kesulitan saat berpartisipasi dalam pemilu karena mereka lebih cenderung tidak peduli atau terpengaruh oleh informasi yang salah. Karena itu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dapat membantu Generasi Z menjadi lebih selektif dan cerdas dalam memilih

politik. Sehingga Pendidikan politik berbasis Pancasila harus ditingkatkan untuk membuat partisipasi mereka lebih bermakna dan beretika.

Prinsip demokrasi dalam Pancasila juga mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan yang sama. Hal ini menjadi suatu yang relevan bagi Gen Z dalam menghadapi berbagai isu sosial dan politik. Mereka perlu dibimbing dan diajak untuk bisa lebih menghargai proses deliberasi yang inklusif dan menghormati setiap pendapat yang berbeda, sehingga Keputusan yang disetujui tidak hanya berdasarkan mayoritas tetapi juga dengan mempertimbangkan kepentingan Bersama. Kemudian, dengan perkembangan pesat teknologi dan informasi, Gen Z memiliki kemampuan yang besar untuk mengakses seriap pengetahuan. Sehingga pengintegrasian prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan politik dan demokrasi harus diiringi dengan dorongan untuk berpikir kritis. Mereka perlu diajarkan untuk tidak menerima informasi secara pasif, tetapi juga harus pandai dalam menganalisis dan menilai informasi tersebut sebelum mengambil tindakan.

Tantangan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi yang ditetapkan sejak diproklamasikan merdeka oleh Soekarno pada tahun 1945. Dinamika demokrasi di negara ini mengalami perubahan pasang surut dalam perjalannya. Dalam Sejarah Indonesia, disebutkan bahwa dinamika perjalanan demokrasi ini mengalami beberapa fase. Sejarah telah mencatat bahwa terdapat beberapa perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan Sejarah tersebut dapat dilihat dari beberapa periode, yakni:

Demokrasi Parlementer

Demokrasi tersebut terjadi pada tahun 1945-1959. Periode demokrasi parlemen ini dikenal juga dengan sebutan Masa Republik Indonesia I, sistem parlementer ini dilakukan setelah satu hari proklamasi kemerdekaan. Pada periode ini konstitusi RIS mulai diberlakukan, Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Yaitu pemerintahan dijalankan oleh perdana Menteri sedangkan presiden hanya sebagai symbol. Hal ini tidak disetujui dalam pelaksanaannya karena dianggap kurang cocok dan menentang berlakunya RIS, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia dinyatakan Kembali menjadi negara kesatuan yang dinyatakan langsung oleh Soekarno dengan memberlakukan UUD. Pada periode ini pula sering terjadi pergantian cabinet parlemen sehingga Pembangunan tidak berjalan dengan mulus. Hal itu dikarenakan masing-masing pihak yang terkait lebih memperhatikan kepentingan partai dan dianggap kurang tanggung jawab dalam menghadapi masalah pemerintahan. Hal itu ditandai dengan jatuh bangunnya cabinet sebanyak 14 kali. Rakyat semakin sadar bahwa hal-hal tersebut bertentangan dengan semangat Pancasila setelah diberlakukannya UUD dengan sistem demokrasi liberal selama hamper 9 tahun. Hingga pada akhirnya pemerintahan sepakat untuk membubarkan Konstituante dan memberlakukan Kembali UUD 1945.

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi ini terjadi pada tahun 1959-1965. Pada periode ini demokrasi terpimpin dapat diartikan sebagai sebuah penjelmaan dari sika keempat Pancasila. Demokrasi ini

terkenal di masa pemerintahan Orde Lama. Adapun konstitusi yang digunakan ialah UUD 1945. Sehingga dalam UUD 1945 ini dinyatakan bahwa dalam demokrasi terpimpin presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, karena presiden dan DPR berada di bawah MPR. Akan tetapi pada masa ini pernyataan tersebut berbanding balik dengan definisi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki berbagai ciri, diantara lainnya adalah; Dominasi presiden, terbatasnya peran partai, berkembangnya pengaruh komunis. Pada periode ini juga banyak terjadi penyimpangan, salah satunya adalah focus kekuasaan justru berada ditangan presiden, dan pengangkatan presiden seumur hidup. Hingga pada akhirnya di periode ini terjadilah G 30 S/ PKI, hal itu menunjukan bahwa telah berakhirnya masa kekuasaan Soekarno dan juga kegagalan demokrasi terpimpin. Hal itu disebabkan pada masa itu Soekarno mendirikan badan-badan ekstra konstitusi yang ternyata dipakai oleh pihak komunis.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi ini terjadi pada tahun 1965-1998. Demokrasi Pancasila ini dicirikan dengan adanya kepastian hukum melalui penegakkan Kembali asas-asas negara hukum yang menjamin penegakkan Hak Asasi Manusia, baik dalam aspek kelompok atau perorangan. Dalam bidang ekonomi, demokrasi Pancasila memiliki arti sendiri yaitu demokrasi Pancasila merupakan sebuah cita-cita demokrasi ekonomi yang sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam UUD. Selain itu demokrasi Pancasila juga diartikan sebagai cita-cita pembinaan terhadap suatu kultur politik yang penuh vitalitas. Demokrasi Pancasila ini sangat menjunjung tinggi penegakkan hukum dengan mengutamakan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, peradilan yang bebas serta tidak memihak.

Demokrasi Mencari Bentuk (Pancasila/Orde reformasi)

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 menandai munculnya Era Reformasi di Indonesia. Era ini dimulai dengan kepemimpinan BJ Habibie. Demokrasi ini dimulai dari tahun 1998 hingga saat ini. BJ Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden kini memimpin Era Reformasi ini. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam Sejarah Indonesia, terutama dalam Sejarah demokrasi Indonesia. Pergantian itu membawa perubahan signifikan pada praktik demokrasi di negara ini. Indonesia telah melalui empat fase demokrasi dengan ciri khasnya masing-masing. Empat fase tersebut diawali dengan masa demokrasi liberal yang berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, yang disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dideklarasikan setelah pembubaran konstituante. Setelah itu demokrasi ini dilanjutkan dengan demokrasi Pancasila yang dimulai pada masa pemerintahan Soeharto. Selanjutnya dilanjutkan dengan era demokrasi transisi yang berlangsung sejak turunnya Presiden Soeharto yang masih berlanjut hingga saat ini.

Pada awal Periode ini yaitu Era Reformasi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat. Tantangan tersebut ialah kenaikan harga barang dan hasa, maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakstabilan keamanan dan politik. Kondisi ini sangat memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi rakyat-rakyat kecil yang

tentunya menjadi mayoritas, sekaligus melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional akibat kurangnya kepemimpinan yang kuat. Tetapi di samping itu proses demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan positif disbanding periode-periode sebelumnya. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang mendapatkan pengajuan luas, baik dari partai-partai politik domestic maupun dunia internasional.

Keterlibatan Gen Z dalam Demokrasi

Keterlibatan Gen Z dalam kampanye sosial biasanya difasilitasi oleh media sosial. Fokus mereka biasanya tertuju pada masalah seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perubahan iklim. Selain itu Gen Z juga semakin banyak terlibat atau bergabung dalam gerakan-gerakan politik yang berfokus pada keadilan sosial.. Nilai yang relevan dalam konteks ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu yang terdapat pada sila ke-5. Gen Z harus memastikan bahwa setiap gerakan politik yang mereka ikuti itu bergokus pada nilai-nilai Pancasila bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang ekonomi, latar belakang sosial atau agama. Gen Z ini dapat mendorong atau menciptakan munculnya gerakan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial. Keterlibatan ini dapat dilakukan dengan menekankan kepada mereka untuk mengedepankan etika dan tanggung jawab pada setiap tindakan.

Penting bagi Gen Z untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka dalam kampanye sosial ini disertai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya dalam nilai ketuhanan, sebagai Generasi yang hidup di era berkembangnya digital ini, Gen Z sering kali terpapar oleh banyaknya informasi yang dapat memengaruhi pola pikir dan tindakan mereka. Dalam hal ini nilai ketuhanan yang esa mengajarkan bahwa spiritualitas dan moralitas itu penting sebagai pondasi dalam berpartisipasi di demokrasi. Nilai persatuan dalam Pancasila mengajarkan bahwa menjaga keharmonisan dalam keberagaman itu sangat penting. Sebagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, Gen Z perlu memahami bahwasannya perbedaan suku, agama, ras dan golongan bukanlah suatu penghalang dalam berpartisipasi aktif pada demokrasi. Keterlibatan ini dapat dilakukan dengan mendorong Gen Z agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang memupuk persatuan, karena keterlibatan dalam sosial ini dapat mengedepankan persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Keterlibatan aktif Gen Z dalam demokrasi juga tidak hanya sebatas menyuarakan pendapat saja, tetapi mereka juga memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial. Gen Z diharapkan dapat lebih peka dalam menghadapi isu-isu ketidakadilan yang terjadi di masyarakat dengan menanamkan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Adapun masalah yang sering terjadi dimasyarakat adalah seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan diskriminasi. Mereka dapat ikut terlibat dalam berbagai kegiatan nyata seperti advokasi kebijakan yang mendukung pemerataan kesejahteraan atau kampanye sosial yang menyoroti ketidakadilan.

Gen Z merupakan Generasi penerus bangsa Indonesia yang seharusnya merasa bangga dengan dasar negara ini yaitu Pancasila. Karena Pancasila ini merupakan sebuah ideologi bangsa yang didalamnya sudah mencakup segala hal. Indonesia sendiri dapat diubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dengan adanya Pancasila yang lebih konplit. Karena perkembangan Zaman ini banyak anak Generasi muda yang memandang sepele terhadap prinsip-prinsip Pancasila, generasi ini dinggap acuh tak acuh pada

bangsanya sendiri. Pengaruh digital ini tidak bisa dihindari oleh generasi muda sekarang, Prinsip-prinsip Pancasila yang luntur sangat menjadi pengaruh yang buruk bagi mereka. Sehingga pendidikan bagi Generasi Z sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap aktivitas politik. Kurikulum sekolah harus ditingkatkan untuk menekankan pengembangan karakter dan pemahaman ideologi Pancasila. Selain itu, Lembaga Pendidikan dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan forum diskusi yang memungkinkan GenZ untuk berbicara dan mempelajari serta memahami bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam konteks politik.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasannya Gen Z perlu terlibat dalam politik dan demokrasi dengan cara yang bijak . Mereka bisa aktif dalam mengikuti Pemilu atau forus diskusi politik lainnya. Seperti dalam Pemilu tahun 2024, Gen Z memiliki banyak peranan penting. Peranan penting tersebut diantara lain adalah, jumlah pemilih yang banyak. Gen Z menjadi kelompok dengan jumlah pemilih tertinggi yaitu sekitar 56% dari total keseluruhan pemilih. Tentunya dengan populasi yang besar hal itu menjadi pengaruh yang besar terhadap hasil pemilu. Kemudian selain itu Gen Z dikenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial dan politik. Mereka lebih aktif dalam mengamati kondisi politik dan sosial dilingkungan mereka, sehingga kerap lebih termotivasi untuk terlibat dalam pemilu. Dengan melalui media sosial, mereka bisa menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran setiap remaja. Gen Z juga dikenal dengan kelompok yang cenderung menginginkan transparasi dan akuntabilitas dari para pemimpin. Mereka lebih kritis terhadap terhadap calon pemimpin yang cenderung tidak memenuhi janji-janji mereka. Sehingga keterlibatan mereka dalam pemilu dapat mendorong calon pemimpin untuk lebih bertanggung jawab.

Peran Pendidikan Demokrasi Dalam Kehidupan Gen Z

Pendidikan demokrasi diartikan sebagai sebuah usaha terencana untuk meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat terutama bagi Gen Z yang akan meneruskan bangsa ini, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan yang demokratis. Pendidikan ini memiliki tujuan yang tidak lain adalah untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif dalam menghadapi isu-isu kewarganegaraan, serta mendorong partisipasi aktif. Selain itu, Pendidikan juga bertujuan untuk mendorong rasa tanggung jawab dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan kebangsaan. Kemudian Pendidikan demokrasi ini juga bertujuan untuk membentuk karakter-karakter yang berintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Adapun partisipasi aktif dalam demokrasi ini merupakan hak dasar setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Pendidikan demokrasi bagi Gen Z ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, hal ini juga memiliki tujuan untuk membantu mendorong partisipasi aktif Gen Z dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa, serta bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Gen Z tentang sistem politik, hukum di Indonesia, dan masalah sosial. Pendidikan politik dan demokrasi ini berfungsi sebagai sarana edukasi bagi Gen Z dan merupakan Langkah awal untuk untuk memahami kehidupan politik dan demokrasi yang dapat memengaruhi

pengambilan kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran Pendidikan politik bagi Generasi muda sangat penting untuk menyadarkan mereka tentang betapa krusialnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain Pendidikan formal, sosialisasi Pendidikan politik di kalangan Gen Z menjadi suatu keharusan. Upaya tersebut merupakan cara punting menggali potensi demografi Indonesia. Gen Z diharapkan dapat berpartisipasi dalam politik dan demokrasi dengan cerdas, aktif, dan berpikir kritis, bukan sekedar apatis. Karena sifat tersebut dapat menjadi ancaman dalam kehidupan dan dapat berdampak negative dalam demokrasi. Sosialisasi ini merupakan uapaya untuk memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat dan bijak. Sehingga Pendidikan sejak dini sangat penting untuk membekali Generasi penerus bangsa dengan pengetahuan dan keterampilan. Karena dua hal itu akan sangat diperlukan untuk menjadi pemilih yang cerdas serta bertanggung jawab.

Berbagai upaya positif dalam memberikan Pendidikan politik kepada generasi Z sengan beragam. Hal ini merupakan awal untuk menyongsong masa depan demokrasi serta kehidupan masyarakat yang lebih maju. Salah satu Langkah yang progresif adalah memberikan teladan yang baik dari para pemimpin yang mengelola kebijakan public. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi ia juga berperan sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Para Pemimpin harus menjadi pelopor dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Karena kepemimpinan yang kuat dan berintegritas sangat penting, terutama untuk membangun negara. Petinggi negara memiliki peran kunci dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi rakyatnya. Sehingga perilaku pejabat negara akan memengaruhi perilaku rakyatnya. Pendidikan politik merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terutama Gen Z . Hal itu dilakukan dengan memberikan pemahaman yang tepat tentang sistem politik, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi politik adalah upaya warga untuk ikut menentukan kebijakan pemerintahan, yang dapat dilakukan melalui pemilu, demonstrasi, atau cara lain untuk menyampaikan aspirasi. Partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua kategori: partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional. Partisipasi konvensional itu melibatkan kegiatan yang umum dan diterima seperti memilih, berdiskusi politik, dan bergabung dengan partai politik. Sedangkan partisipasi non konvesional ialah yang melibatkan tindakan yang lebih ekstrem seperti demonstrasi, mogok, vandalism, bahkan kekerasan.

Kesimpulan

Generasi Z adalah kelompok yang lahir sekitar tahun 1990 hingga 2021, kelompok ini merupakan generasi yang tumbuh di era digital sedang berkembang pesat dengan kecakapan tinggi dalam teknologi. Kelompok ini memiliki potensi besar untuk terlibat pada demokrasi Indonesia melalui keterlibatannya secara aktif dalam sosial dan sosial. Keterlibatan ini harus diimbangi dengan pengintegrasian prinsip-prinsip Pancasila, seperti persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah. Hal itu tidak lain adalah untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka lebih bermakna. Dalam konteks pemilu, Generasi ini berperan aktif sebagai kelompok pemilih dengan jumlah terbanyak,

sehingga hal itu memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan bangsa. Pendidikan politik berbasis Pancasila ini menjadi suatu hal esensial untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memilih secara cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, peran media sosial juga sangat memungkinkan mereka untuk menyuarakan pendapat-pendapat dan meningkatkan kesadaran tentang isu sosial, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan perubahan iklim.

Demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan Panjang dengan empat fase utama, yakni; demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan Era Reformasi. Setiap fase memiliki ciri khas dan tantangan sendiri. Masa parlementer (1945-1959) menghadapi ketidakstabilan karena sering terjadi pergantian cabinet. Demokrasi terpimpin (1959-1965) diwarnai dengan dominasi presiden dan penyimpangan kekuasaan yang berujung pada keruntuhannya Orde Lama. Demokrasi Pancasila (1965-1998) menekankan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, Meskipun sering dianggap otories. Pemberian Pendidikan politik juga memerlukan teladan dari para pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena perilaku mereka sangat memengaruhi masyarakat. Partisipasi politik, baik melalui cara konvensional seperti pemilu dan diskusi, maupun non konvensional seperti demonstrasi, merupakan hak warga negara yang perlu diarahkan dengan bijaksana. Pendidikan politik sejak dulu menjadi fondasi penting untuk membangun demokrasi yang kokoh, maju, dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Al Musa Karim, dkk. (2020). ‘Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019’’. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 3, No.2.
- Aziz, M. A. (2016). Pilkada serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945. Politik Indonesia Indonesian Political Science Review, 1 (2), 154-170.
- Budiarjoo, m. (1978). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jalarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dela, Rosa., Fadhila, D., Salsabila, N., Tangguh, R.S., Anwar, & Randa, M. (2024). Peran Generasi Z dalam Pemilu yang Bersih dan Demokratis. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7 (2), 2024.
- Esha, M. I. A. (2013). Kepemimpinan di era demokrasi deliberatif. *El-Qudwah: Jurnal Penelitian Integrasi Sains dan Islam*, 8(2), 23-56. <http://repository.uin-malang.ac.id/1464/>
- Ginting, H. (2017). Peranan Pancasila Dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa Pada Generasi Muda. In Prosiding Seminar Nasional tahunan Fakultas Ilmu Sosial universitas Negeri Medan, 1 (pp), 197-201
- Khotimah, K. (2024). *Manajemen kurikulum projek penguatan profil pelajar pancasila untuk mewujudkan imtaq pada siswa di SDN Warungdowo I Pasuruan* (Doctoral

dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://repository.uin-malang.ac.id/23447/>

Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman dan Keterlibatan Generasi A Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1 (1).

Yanto, Dwi. (2016). Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Ittihad: Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol.14 (25), April 2016